



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati mengatur pembagian Alokasi dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati mengatur tata cara penyaluran Alokasi dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pembagian dan penyaluran Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025;
 14. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPMDP3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru Selatan.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Minimal 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembagian dan penyaluran ADD dan DBH yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB II
PENENTUAN BESARAN ADD DAN DBH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) ADD dan DBH untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan berdasarkan:
 - a. Alokasi untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan untuk Aparatur Desa Persiapan
 - b. Alokasi Dasar; dan
 - c. Alokasi Formula.
- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.

Bagian Kedua
Alokasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan
untuk Aparatur Desa Persiapan

Pasal 4

Alokasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan untuk Aparatur Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan aloaksi yang diangkat untuk penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Desa persiapan yang diambil dari Pagu Alokasi Dana Desa

Bagian Ketiga
Alokasi Dasar

Pasal 5

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a merupakan alokasi minimal dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD dan DBH yang dianggarkan kepada Desa setelah dikurangi Penghasilan Tetap dan Tunjangan untuk Aparatur Desa persiapan dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa di Kabupaten Buru Selatan.

Bagian Keempat
Alokasi Formula

Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b untuk ADD/DBH merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan

jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

- (2) Pagu alokasi formula untuk ADD/DBH dihitung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari anggaran ADD/DBH setelah dikurangi Penghasilan Tetap dan Tunjangan untuk Aparatur Desa persiapan.

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula untuk ADD/DBH sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

$$W = [(0,1 \times Z1) + (0,5 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times (ADD/DBH \text{ kab} - AD_{\text{kab}})$$

W	= ADD/DBH setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
Z3	= rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
Z4	= rasio IKG Kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa.
ADD/DBH kab	= pagu Alokasi Dana Desa/Dana Bagi Hasil Kabupaten.
AD _{kab}	= besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

Pasal 8

Besaran ADD/DBH sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) huruf a dan b adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ADD/DBH

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD/DBH dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD/DBH ke rekening kas Desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara triwulan pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa;
- b. Triwulan II sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa;
- c. Triwulan III sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa;
- d. Triwulan IV sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pagu ADD setiap Desa;

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD/DBH triwulan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD/DBH triwulan I kepada Bupati cq. Kepala DPMDP3A;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024;
 - c. dokumen Rencana Anggaran Kas Desa Tahun 2024;
 - d. Surat Rekomendasi Camat; dan
 - e. *Checklist* dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (2) Penyaluran ADD/DBH triwulan II sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD/DBH Triwulan II kepada Bupati cq. Kepala DPMDP3A;
 - b. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
 - c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2023;
 - d. laporan realisasi penggunaan ADD/DBH triwulan I telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - e. Surat Rekomendasi Camat;
 - f. *Checklist* dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Penyaluran ADD/DBH Triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD/DBH Triwulan III kepada Bupati cq. Kepala DPMDP3A;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD/DBH sampai triwulan II telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. Surat Rekomendasi Camat;
 - d. *Checklist* dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (4) Penyaluran ADD/DBH Triwulan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Surat permohonan penyaluran ADD/DBH Triwulan IV kepada Bupati cq. Kepala DPMDP3A;

Paraf Koordinasi

- b. laporan realisasi penggunaan ADD/DBH sampai triwulan III telah digunakan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen);
- c. Surat Rekomendasi Camat;
- d. *Checklist* dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 11

- (1) Dokumen pendukung lainnya untuk penyaluran ADD/DBH Triwulan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
 - b. Fotocopy rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;
 - c. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala sub bagian keuangan/Bendahara Desa;
 - d. Berita acara penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- (2) Dokumen pendukung lainnya untuk pengajuan ADD/DBH Triwulan II sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf f terdiri dari :
 - a. Soft Copy Dokumen Pertanggungjawaban ADD/DBH triwulan IV tahun sebelumnya dan Triwulan I tahun berjalan beserta kewajiban Pajak;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD/DBH triwulan IV tahun sebelumnya dan ADD/DBH triwulan I Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
- (3) Dokumen pendukung lainnya untuk penyaluran ADD/DBH Triwulan III sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf d yaitu
 - a. Soft Copy Dokumen Pertanggungjawaban ADD/DBH Triwulan II Tahun Anggaran berjalan.
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD /DBH triwulan II Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
- (4) Dokumen pendukung lainnya untuk penyaluran ADD/DBH Triwulan III sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) huruf d yaitu
 - a. Soft Copy Dokumen Pertanggungjawaban ADD/DBH Triwulan III Tahun Anggaran berjalan.
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD /DBH triwulan III Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
- (5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuat dengan memperhatikan masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 disampaikan kepada Bupati cq. Kepala DPMDP3A melalui Camat setempat;
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat bersamaan dengan pengajuan ADD/DBH per triwulan.

Pasal 13

Sistematika penyaluran ADD/DBH diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD/DBH kepada Bupati cq. Kepala DPMDP3A melalui Camat;
- b. Pengajuan permohonan penyaluran ADD/DBH sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Camat dan dibantu oleh Tim Evaluasi Tingkat Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Verifikasi oleh Camat dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari untuk masing-masing desa setelah berkas disampaikan.
- d. Camat memberikan rekomendasi terhadap berkas persyaratan yang telah diverifikasi dan menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran tersebut kepada Kepala DPMDP3A.
- e. Kepala DPMDP3A memberikan rekomendasi permohonan penyaluran ADD dan disampaikan kepada Kepala BPKAD;
- f. Kepala BPKAD menyalurkan ADD/DBH langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- g. Jika dalam proses verifikasi berkas permohonan penyaluran ADD/DBH sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Camat yang berkeberatan melakukan verifikasi dengan alasan keterbatasan Sumberdaya Aparatur di Kecamatan, maka Proses verifikasi dikembalikan kepada DPMDP3A dengan terlebih dahulu Camat mengajukan Surat ketidakanggupan kepada Bupati Cq DPMDP3A.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan ADD/DBH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pelaksanaan APBDesa.
- (2) Penggunaan ADD/DBH untuk melaksanakan kewenangan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di Desa.

BAB V
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD/DBH setiap triwulan kepada Bupati c.q. Kepala DPMDP3A.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD/DBH setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD/DBH tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD /DBH setiap triwulan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD/DBH tahun anggaran sebelumnya disampaikan pada saat pengajuan penyaluran ADD/DBH triwulan II Tahun anggaran berjalan.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan ADD/DBH terintegrasi dengan aplikasi siskeudes.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI BURU SELATAN,

LA HAMIDI

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 17 Maret 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR ..§.....

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah (DBH) adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ADD/DBH setiap tahun anggaran paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD/DBH mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, dan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Olehnya itu dalam rangka transparansi, akuntabel, efektif dan efisien penyalurannya, dibutuhkan tata cara pembagian Alokasi Dana Desa sebagai pedoman dalam penyalurannya dan perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
 NOMOR : 5 TAHUN 2025
 TANGGAL : 17 MARET 2025
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA			JUMLAH PAGU	RENCANA PENYALURAN				
			ALOKASI SILTAP & TUNJANGAN APARATUR DESA PERSIAPAN (Rp)	ADDM (90%) (Rp)	ADDP (10%) (Rp)		TRIWULAN I (25%) (Rp)	TRIWULAN II (25%) (Rp)	TRIWULAN III (25%) (Rp)	TRIWULAN IV (25%) (Rp)	KURANG SALUR 2024 (Rp)
1	2	3	4	4	5	6 = 4 + 5	8	9	10	11	
1	Namrole	Wamkana	67,200,000	400,932,967	55,140,000	523,273,000	130,818,250	130,818,250	130,818,250	130,818,250	128,151,000
2	Namrole	Waenalut	-	400,932,967	26,116,000	427,049,000	106,762,250	106,762,250	106,762,250	106,762,250	104,264,750
3	Namrole	Lektama	-	400,932,967	25,426,000	426,359,000	106,589,750	106,589,750	106,589,750	106,589,750	104,096,250
4	Namrole	Fatnrite	-	400,932,967	22,653,000	423,586,000	105,896,500	105,896,500	105,896,500	105,896,500	103,419,250
5	Namrole	Elfule	-	400,932,967	33,038,000	433,971,000	108,492,750	108,492,750	108,492,750	108,492,750	105,954,750
6	Namrole	Leku	-	400,932,967	39,505,000	440,438,000	110,109,500	110,109,500	110,109,500	110,109,500	107,533,750
7	Namrole	Oki Baru	-	400,932,967	53,453,000	454,386,000	113,596,500	113,596,500	113,596,500	113,596,500	110,939,250
8	Namrole	Oki Lama	-	400,932,967	58,522,000	459,455,000	114,863,750	114,863,750	114,863,750	114,863,750	112,176,750
9	Namrole	Labuang	-	400,932,967	59,246,000	460,179,000	115,044,750	115,044,750	115,044,750	115,044,750	112,353,500
10	Namrole	Wali	-	400,932,967	20,080,000	421,013,000	105,253,250	105,253,250	105,253,250	105,253,250	102,791,250
11	Namrole	Tikbary	-	400,932,967	31,648,000	432,581,000	108,145,250	108,145,250	108,145,250	108,145,250	105,615,500
12	Namrole	Masnana	-	400,932,967	20,803,000	421,736,000	105,434,000	105,434,000	105,434,000	105,434,000	102,967,500
13	Namrole	Kamlanglale	-	400,932,967	23,568,000	424,501,000	106,125,250	106,125,250	106,125,250	106,125,250	103,642,500
14	Namrole	Waenono	-	400,932,967	26,597,000	427,530,000	106,882,500	106,882,500	106,882,500	106,882,500	104,382,250
15	Namrole	Namrinat	-	400,932,967	38,416,000	439,349,000	109,837,250	109,837,250	109,837,250	109,837,250	107,268,000
16	Namrole	Waefusi	-	400,932,967	17,300,700	418,234,000	104,558,500	104,558,500	104,558,500	104,558,500	102,121,250
17	Namrole	Batu Tulis	-	400,932,967	20,955,000	421,888,000	105,472,000	105,472,000	105,472,000	105,472,000	103,005,000
Jumlah Bagian I			67,200,000	6,815,860,433	572,466,700	7,455,528,000	1,863,882,000	1,863,882,000	1,863,882,000	1,863,882,000	1,820,682,500
18	Waesama	Waetawa	-	400,932,967	66,189,000	467,122,000	116,780,500	116,780,500	116,780,500	116,780,500	114,048,750
19	Waesama	Waesili	-	400,932,967	56,465,000	457,398,000	114,349,500	114,349,500	114,349,500	114,349,500	111,674,500
20	Waesama	Lena	-	400,932,967	33,400,000	434,333,000	108,583,250	108,583,250	108,583,250	108,583,250	106,043,000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA			JUMLAH PAGU	RENCANA PENYALURAN				
			ALOKASI SILTAP & TUNJANGAN APARATUR DESA PERSIAPAN (Rp)	ADDM (90%) (Rp)	ADDP (10%) (Rp)		TRIWULAN I (25%) (Rp)	TRIWULAN II (25%) (Rp)	TRIWULAN III (25%) (Rp)	TRIWULAN IV (25%) (Rp)	KURANG SALUR 2024 (Rp)
1	2	3	4	4	5	6 = 4 + 5	8	9	10	11	
21	Waesama	Simi	-	400,932,967	71,853,000	472,786,000	118,196,500	118,196,500	118,196,500	118,196,500	115,431,750
22	Waesama	Waelikut	-	400,932,967	57,424,000	458,357,000	114,589,250	114,589,250	114,589,250	114,589,250	111,908,750
23	Waesama	Wamsisi	92,400,000	400,932,967	73,700,000	567,033,000	141,758,250	141,758,250	141,758,250	141,758,250	138,982,500
24	Waesama	Pohon Batu	-	400,932,967	46,281,000	447,214,000	111,803,500	111,803,500	111,803,500	111,803,500	109,188,250
25	Waesama	Waeteba	-	400,932,967	46,400,000	447,333,000	111,833,250	111,833,250	111,833,250	111,833,250	109,217,250
26	Waesama	Hote	-	400,932,967	25,648,000	426,581,000	106,645,250	106,645,250	106,645,250	106,645,250	104,150,500
27	Waesama	Waemasing	-	400,932,967	36,464,000	437,397,000	109,349,250	109,349,250	109,349,250	109,349,250	106,791,250
28	Waesama	Batu Kasa	-	400,932,967	35,999,000	436,932,000	109,233,000	109,233,000	109,233,000	109,233,000	106,677,750
Jumlah Bagian II			92,400,000	4,410,262,633	549,823,000	5,052,486,000	1,263,121,500	1,263,121,500	1,263,121,500	1,263,121,500	1,234,114,250
29	Ambalau	Lumoy	-	400,932,967	81,527,000	482,460,000	120,615,000	120,615,000	120,615,000	120,615,000	117,793,500
30	Ambalau	Masawoy	-	400,932,967	79,481,000	480,414,000	120,103,500	120,103,500	120,103,500	120,103,500	117,294,000
31	Ambalau	Ulima	-	400,932,967	68,250,000	469,183,000	117,295,750	117,295,750	117,295,750	117,295,750	114,551,750
32	Ambalau	Kampung Baru	-	400,932,967	56,226,000	457,159,000	114,289,750	114,289,750	114,289,750	114,289,750	111,616,250
33	Ambalau	Silwar	-	400,932,967	62,713,000	463,646,000	115,911,500	115,911,500	115,911,500	115,911,500	113,200,000
34	Ambalau	Selasi	-	400,932,967	58,906,000	459,839,000	114,959,750	114,959,750	114,959,750	114,959,750	112,270,500
35	Ambalau	Elara	-	400,932,967	107,775,000	508,705,000	127,176,250	127,176,250	127,176,250	127,176,250	124,202,250
Jumlah Bagian III			-	2,806,530,767	514,878,000	3,321,406,000	830,351,500	830,351,500	830,351,500	830,351,500	810,928,250
36	Kepala Madan	Balpetu	-	400,932,967	45,702,000	446,635,000	111,658,750	111,658,750	111,658,750	111,658,750	109,046,750
37	Kepala Madan	Waekeka	-	400,932,967	31,524,000	432,457,000	108,114,250	108,114,250	108,114,250	108,114,250	105,585,250
38	Kepala Madan	Biloro	-	400,932,967	35,808,000	436,741,000	109,185,250	109,185,250	109,185,250	109,185,250	106,631,000
39	Kepala Madan	Nanali	-	400,932,967	84,210,000	485,143,000	121,285,750	121,285,750	121,285,750	121,285,750	118,448,500
40	Kepala Madan	Pasir Putih	134,400,000	400,932,967	81,298,000	616,631,000	154,157,750	154,157,750	154,157,750	154,157,750	151,337,500
41	Kepala Madan	Fogi	-	400,932,967	43,899,000	444,832,000	111,208,000	111,208,000	111,208,000	111,208,000	108,606,500
42	Kepala Madan	Waepandan	-	400,932,967	65,349,000	466,282,000	116,570,500	116,570,500	116,570,500	116,570,500	113,843,500
43	Kepala Madan	Walbele	-	400,932,967	45,416,000	446,349,000	111,587,250	111,587,250	111,587,250	111,587,250	108,976,750
44	Kepala Madan	Air Ternate	-	400,932,967	62,771,000	463,704,000	115,926,000	115,926,000	115,926,000	115,926,000	113,214,250
45	Kepala Madan	Sekat	67,200,000	400,932,967	39,044,000	507,177,000	126,794,250	126,794,250	126,794,250	126,794,250	124,221,250
46	Kepala Madan	Waaha	-	400,932,967	25,572,000	426,505,000	106,626,250	106,626,250	106,626,250	106,626,250	104,131,750
47	Kepala Madan	Bala-bala	-	400,932,967	27,458,000	428,391,000	107,097,750	107,097,750	107,097,750	107,097,750	104,592,500

Para Akademi

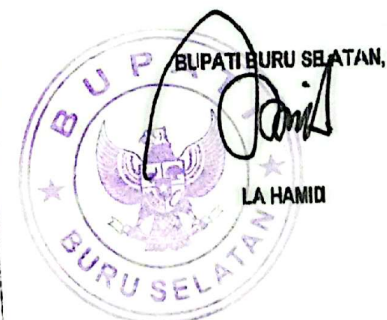
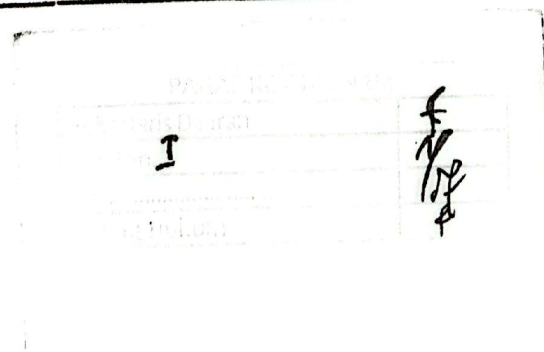
H P

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA			JUMLAH PAGU	RENCANA PENYALURAN				
			ALOKASI SILTAP & TUNJANGAN APARATUR DESA PERSIAPAN	ADDM (90%)	ADDP (10%)		TRIWULAN I (25%)	TRIWULAN II (25%)	TRIWULAN III (25%)	TRIWULAN IV (25%)	KURANG SALUR 2024
			(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	4	5	6 = 4 + 5	8	9	10	11	
48	Kepala Madan	Batu Layar	-	400,932,967	24,727,000	425,660,000	106,415,000	106,415,000	106,415,000	106,415,000	103,925,750
49	Kepala Madan	Siopot	-	400,932,967	29,875,000	430,808,000	107,702,000	107,702,000	107,702,000	107,702,000	105,182,500
50	Kepala Madan	Emguhen	-	400,932,967	23,310,000	424,243,000	106,060,750	106,060,750	106,060,750	106,060,750	103,579,750
51	Kepala Madan	Waehtong	-	400,932,967	31,585,000	432,518,000	108,129,500	108,129,500	108,129,500	108,129,500	105,600,000
Jumlah Bagian IV			201,600,000	6,414,927,467	697,548,000	7,314,076,000	1,828,519,000	1,828,519,000	1,828,519,000	1,828,519,000	1,786,923,500
52	Leksula	Waemulang	67,200,000	400,932,967	93,514,000	561,647,000	140,411,750	140,411,750	140,411,750	140,411,750	137,520,000
53	Leksula	Waeturen	-	400,932,967	59,206,000	460,139,000	115,034,750	115,034,750	115,034,750	115,034,750	112,343,750
54	Leksula	Waehaka	-	400,932,967	34,357,000	435,290,000	108,822,500	108,822,500	108,822,500	108,822,500	106,276,750
55	Leksula	Waemala	-	400,932,967	39,675,000	440,608,000	110,152,000	110,152,000	110,152,000	110,152,000	107,575,250
56	Leksula	Erwiri	-	400,932,967	76,400,000	477,333,000	119,333,250	119,333,250	119,333,250	119,333,250	116,541,750
57	Leksula	Tifu	-	400,932,967	27,118,000	428,051,000	107,012,750	107,012,750	107,012,750	107,012,750	104,509,500
58	Leksula	Mepa	-	400,932,967	57,058,000	457,991,000	114,497,750	114,497,750	114,497,750	114,497,750	111,819,250
59	Leksula	Leksula	-	400,932,967	54,482,000	455,415,000	113,853,750	113,853,750	113,853,750	113,853,750	111,190,500
60	Leksula	Nalbessy	-	400,932,967	31,029,000	431,962,000	107,990,500	107,990,500	107,990,500	107,990,500	105,464,250
61	Leksula	Kase	-	400,932,967	26,272,000	427,205,000	106,801,250	106,801,250	106,801,250	106,801,250	104,302,750
62	Leksula	Neath	-	400,932,967	42,567,000	443,500,000	110,875,000	110,875,000	110,875,000	110,875,000	108,281,250
63	Leksula	Liang	-	400,932,967	74,399,000	475,332,000	118,833,000	118,833,000	118,833,000	118,833,000	116,053,250
64	Leksula	Slealale	-	400,932,967	52,339,000	453,272,000	113,318,000	113,318,000	113,318,000	113,318,000	110,667,250
65	Leksula	Walunghelat	-	400,932,967	24,832,000	425,765,000	106,441,250	106,441,250	106,441,250	106,441,250	103,951,250
66	Leksula	Wahaolon	-	400,932,967	33,403,000	434,336,000	108,584,000	108,584,000	108,584,000	108,584,000	106,043,750
67	Leksula	Wewali	-	400,932,967	27,288,000	428,221,000	107,055,250	107,055,250	107,055,250	107,055,250	104,551,000
68	Leksula	Waenamaolon	-	400,932,967	33,032,000	433,965,000	108,491,250	108,491,250	108,491,250	108,491,250	105,953,250
69	Leksula	Grahwaen	-	400,932,967	24,334,000	425,267,000	106,316,750	106,316,750	106,316,750	106,316,750	103,829,750
70	Leksula	Terkuri	-	400,932,967	23,819,000	424,752,000	106,188,000	106,188,000	106,188,000	106,188,000	103,704,000
Jumlah V			67,200,000	7,617,726,367	835,124,000	8,520,051,000	2,130,012,750	2,130,012,750	2,130,012,750	2,130,012,750	2,080,578,500
71	Fena Fafan	Nusarua	-	400,932,967	43,401,000	444,334,000	111,083,500	111,083,500	111,083,500	111,083,500	108,485,000
72	Fena Fafan	Mangeswaen	-	400,932,967	45,280,000	446,213,000	111,553,250	111,553,250	111,553,250	111,553,250	108,943,750
73	Fena Fafan	Waekatin	-	400,932,967	59,974,000	460,907,000	115,226,750	115,226,750	115,226,750	115,226,750	112,531,250
74	Fena Fafan	Fakal	-	400,932,967	25,017,000	425,950,000	106,487,500	106,487,500	106,487,500	106,487,500	103,996,500

Part 1 of 1

14

NO	KECAMATAN	NAMA DESA			JUMLAH PAGU	RENCANA PENYALURAN			
			BHPRM (90%)	BHPRP (10%)		TRIWULAN I (25%)	TRIWULAN II (25%)	TRIWULAN III (25%)	TRIWULAN IV (25%)
1	2	3	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4			5	6 = 4 + 5	8	9	10	11	
65	Leksula	Walunghelat	2,777,778	172,000	2,950,000	737,500	737,500	737,500	737,500
66	Leksula	Wahaolon	2,777,778	231,000	3,009,000	752,250	752,250	752,250	752,250
67	Leksula	Wewali	2,777,778	189,000	2,967,000	741,750	741,750	741,750	741,750
68	Leksula	Waenamaolon	2,777,778	229,000	3,007,000	751,750	751,750	751,750	751,750
69	Leksula	Grahwaen	2,777,778	169,000	2,947,000	736,750	736,750	736,750	736,750
70	Leksula	Terkuri	2,777,778	165,000	2,943,000	735,750	735,750	735,750	735,750
Jumlah V			52,777,778	5,785,000	58,562,778	14,641,750	14,641,750	14,641,750	14,641,750
71	Fena Fafan	Nusarua	2,777,778	301,000	3,079,000	769,750	769,750	769,750	769,750
72	Fena Fafan	Mangeswae	2,777,778	314,000	3,092,000	773,000	773,000	773,000	773,000
73	Fena Fafan	Waekatin	2,777,778	416,000	3,194,000	798,500	798,500	798,500	798,500
74	Fena Fafan	Fakal	2,777,778	173,000	2,951,000	737,750	737,750	737,750	737,750
75	Fena Fafan	Uneth	2,777,778	398,000	3,176,000	794,000	794,000	794,000	794,000
76	Fena Fafan	Waereman	2,777,778	369,000	3,147,000	786,750	786,750	786,750	786,750
77	Fena Fafan	Waelo	2,777,778	366,000	3,144,000	786,000	786,000	786,000	786,000
78	Fena Fafan	Siwatiahin	2,777,778	160,000	2,938,000	734,500	734,500	734,500	734,500
79	Fena Fafan	Trukat	2,777,778	159,000	2,937,000	734,250	734,250	734,250	734,250
80	Fena Fafan	Waeken	2,777,778	205,000	2,983,000	745,750	745,750	745,750	745,750
81	Fena Fafan	Batu Karang	2,777,778	179,000	2,957,000	739,250	739,250	739,250	739,250
Jumlah VI			30,555,556	3,040,000	33,595,556	8,399,500	8,399,500	8,399,500	8,399,500
JUMLAH TOTAL. (I + II + III + IV + V + VI)			225,000,000	25,000,000	250,000,000	62,500,000	62,500,000	62,500,000	62,500,000



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2025

TANGGAL : 17 MARET 2025

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

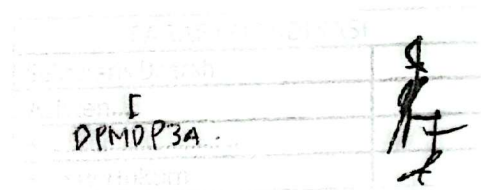
PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	NAMA DESA			JUMLAH PAGU	RENCANA PENYALURAN			
			BHPRM (90%)	BHPRP (10%)		TRIWULAN I (25%)	TRIWULAN II (25%)	TRIWULAN III (25%)	TRIWULAN IV (25%)
1	2	3	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4			5	6 = 4 + 5	8	9	10	11	
1	Namrole	Wamkana	2,777,778	382,000	3,160,000	790,000	790,000	790,000	790,000
2	Namrole	Waenalut	2,777,778	181,000	2,959,000	739,750	739,750	739,750	739,750
3	Namrole	Lektama	2,777,778	176,000	2,954,000	738,500	738,500	738,500	738,500
4	Namrole	Fatmite	2,777,778	157,000	2,935,000	733,750	733,750	733,750	733,750
5	Namrole	Elfule	2,777,778	229,000	3,007,000	751,750	751,750	751,750	751,750
6	Namrole	Leku	2,777,778	274,000	3,052,000	763,000	763,000	763,000	763,000
7	Namrole	Oki Baru	2,777,778	370,000	3,148,000	787,000	787,000	787,000	787,000
8	Namrole	Oki Lama	2,777,778	405,000	3,183,000	795,750	795,750	795,750	795,750
9	Namrole	Labuang	2,777,778	410,000	3,188,000	797,000	797,000	797,000	797,000
10	Namrole	Wali	2,777,778	139,000	2,917,000	729,250	729,250	729,250	729,250
11	Namrole	Tikbary	2,777,778	219,000	2,997,000	749,250	749,250	749,250	749,250
12	Namrole	Masnana	2,777,778	144,000	2,922,000	730,500	730,500	730,500	730,500
13	Namrole	Kamlanglele	2,777,778	163,000	2,941,000	735,250	735,250	735,250	735,250
14	Namrole	Waenono	2,777,778	184,000	2,962,000	740,500	740,500	740,500	740,500
15	Namrole	Namrinat	2,777,778	266,000	3,044,000	761,000	761,000	761,000	761,000
16	Namrole	Waefusi	2,777,778	121,000	2,899,000	724,750	724,750	724,750	724,750
17	Namrole	Batu Tulis	2,777,778	145,000	2,923,000	730,750	730,750	730,750	730,750
Jumlah Bagian I			47,222,222	3,965,000	51,191,000	12,797,750	12,797,750	12,797,750	12,797,750

NO	KECAMATAN	NAMA DESA			JUMLAH PAGU	RENCANA PENYALURAN			
			BHPRM (90%)	BHPRP (10%)		TRIWULAN I (25%)	TRIWULAN II (25%)	TRIWULAN III (25%)	TRIWULAN IV (25%)
1	2	3	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4			5		6 = 4 + 5	8	9	10	11
18	Waesama	Waetawa	2,777,778	459,000	3,237,000	809,250	809,250	809,250	809,250
19	Waesama	Waesili	2,777,778	391,000	3,169,000	792,250	792,250	792,250	792,250
20	Waesama	Lena	2,777,778	231,000	3,009,000	752,250	752,250	752,250	752,250
21	Waesama	Simi	2,777,778	498,000	3,276,000	819,000	819,000	819,000	819,000
22	Waesama	Waelikut	2,777,778	398,000	3,176,000	794,000	794,000	794,000	794,000
23	Waesama	Wamsisi	2,777,778	511,000	3,289,000	822,250	822,250	822,250	822,250
24	Waesama	Pohon Batu	2,777,778	321,000	3,099,000	774,750	774,750	774,750	774,750
25	Waesama	Waeteba	2,777,778	321,000	3,099,000	774,750	774,750	774,750	774,750
26	Waesama	Hote	2,777,778	178,000	2,956,000	739,000	739,000	739,000	739,000
27	Waesama	Waemasing	2,777,778	253,000	3,031,000	757,750	757,750	757,750	757,750
28	Waesama	Batu Kasa	2,777,778	249,000	3,027,000	756,750	756,750	756,750	756,750
Jumlah Bagian II			30,555,556	3,810,000	34,368,000	8,592,000	8,592,000	8,592,000	8,592,000
29	Ambalau	Lumoy	2,777,778	565,000	3,343,000	835,750	835,750	835,750	835,750
30	Ambalau	Masawoy	2,777,778	551,000	3,329,000	832,250	832,250	832,250	832,250
31	Ambalau	Ulima	2,777,778	473,000	3,251,000	812,750	812,750	812,750	812,750
32	Ambalau	Kampung Baru	2,777,778	390,000	3,168,000	792,000	792,000	792,000	792,000
33	Ambalau	Silwar	2,777,778	434,000	3,212,000	803,000	803,000	803,000	803,000
34	Ambalau	Selasi	2,777,778	408,000	3,186,000	796,500	796,500	796,500	796,500
35	Ambalau	Elara	2,777,778	747,000	3,507,000	876,750	876,750	876,750	876,750
Jumlah Bagian III			19,444,444	3,568,000	22,996,000	5,749,000	5,749,000	5,749,000	5,749,000
36	Kepala Madan	Balpetu	2,777,778	317,000	3,095,000	773,750	773,750	773,750	773,750
37	Kepala Madan	Waekeka	2,777,778	218,000	2,996,000	749,000	749,000	749,000	749,000
38	Kepala Madan	Biloro	2,777,778	248,000	3,026,000	756,500	756,500	756,500	756,500
39	Kepala Madan	Nanali	2,777,778	583,000	3,361,000	840,250	840,250	840,250	840,250
40	Kepala Madan	Pasir Putih	2,777,778	563,000	3,341,000	835,250	835,250	835,250	835,250

NO	KECAMATAN	NAMA DESA			JUMLAH PAGU	RENCANA PENYALURAN			
			BHPRM (90%)	BHIRP (10%)		TRIWULAN I (25%)	TRIWULAN II (25%)	TRIWULAN III (25%)	TRIWULAN IV (25%)
1	2	3	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
			4	5	6 = 4 + 5	8	9	10	11
41	Kepala Madan	Fogi	2,777,778	304,000	3,082,000	770,500	770,500	770,500	770,500
42	Kepala Madan	Waepandan	2,777,778	453,000	3,231,000	807,750	807,750	807,750	807,750
43	Kepala Madan	Walbele	2,777,778	315,000	3,093,000	773,250	773,250	773,250	773,250
44	Kepala Madan	Air Ternate	2,777,778	435,000	3,213,000	803,250	803,250	803,250	803,250
45	Kepala Madan	Sekat	2,777,778	271,000	3,049,000	762,250	762,250	762,250	762,250
46	Kepala Madan	Waeha	2,777,778	177,000	2,955,000	738,750	738,750	738,750	738,750
47	Kepala Madan	Bala-bala	2,777,778	190,000	2,968,000	742,000	742,000	742,000	742,000
48	Kepala Madan	Batu Layar	2,777,778	171,000	2,949,000	737,250	737,250	737,250	737,250
49	Kepala Madan	Siopot	2,777,778	207,000	2,985,000	746,250	746,250	746,250	746,250
50	Kepala Madan	Emguhen	2,777,778	161,000	2,939,000	734,750	734,750	734,750	734,750
51	Kepala Madan	Wahtong	2,777,778	219,000	2,997,000	749,250	749,250	749,250	749,250
Jumlah Bagian IV			44,444,444	4,832,000	49,280,000	12,320,000	12,320,000	12,320,000	12,320,000
52	Leksula	Waemulang	2,777,778	648,000	3,426,000	856,500	856,500	856,500	856,500
53	Leksula	Waeturen	2,777,778	410,000	3,188,000	797,000	797,000	797,000	797,000
54	Leksula	Waehaka	2,777,778	238,000	3,016,000	754,000	754,000	754,000	754,000
55	Leksula	Waemala	2,777,778	275,000	3,053,000	763,250	763,250	763,250	763,250
56	Leksula	Erwiri	2,777,778	529,000	3,307,000	826,750	826,750	826,750	826,750
57	Leksula	Tifu	2,777,778	188,000	2,966,000	741,500	741,500	741,500	741,500
58	Leksula	Mepa	2,777,778	395,000	3,173,000	793,250	793,250	793,250	793,250
59	Leksula	Leksula	2,777,778	377,000	3,155,000	788,750	788,750	788,750	788,750
60	Leksula	Nalbessy	2,777,778	215,000	2,993,000	748,250	748,250	748,250	748,250
61	Leksula	Kase	2,777,778	182,000	2,960,000	740,000	740,000	740,000	740,000
62	Leksula	Neath	2,777,778	295,000	3,073,000	768,250	768,250	768,250	768,250
63	Leksula	Liang	2,777,778	515,000	3,293,000	823,250	823,250	823,250	823,250
64	Leksula	Slealale	2,777,778	363,000	3,141,000	785,250	785,250	785,250	785,250

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA			JUMLAH PAGU (Rp) 6 = 4 + 5	RENCANA PENYALURAN				
			ALOKASI SILTAP & TUNJANGAN APARATUR DESA PERSIAPAN (Rp) 4	ADDM (90%) (Rp) 4	ADDP (10%) (Rp) 5		TRIWULAN I (25%) (Rp) 8	TRIWULAN II (25%) (Rp) 9	TRIWULAN III (25%) (Rp) 10	TRIWULAN IV (25%) (Rp) 11	KURANG SALUR 2024 (Rp)
75	Fena Fafan	Uneth	-	400,932,967	57,442,000	458,375,000	114,593,750	114,593,750	114,593,750	114,593,750	111,913,000
76	Fena Fafan	Waereman	-	400,932,967	53,239,000	454,172,000	113,543,000	113,543,000	113,543,000	113,543,000	110,887,000
77	Fena Fafan	Waelo	-	400,932,967	52,820,000	453,753,000	113,438,250	113,438,250	113,438,250	113,438,250	110,784,750
78	Fena Fafan	Siwatlahin	-	400,932,967	23,090,000	424,023,000	106,005,750	106,005,750	106,005,750	106,005,750	103,526,000
79	Fena Fafan	Trukat	-	400,932,967	22,932,000	423,865,000	105,966,250	105,966,250	105,966,250	105,966,250	103,487,250
80	Fena Fafan	Waeken	-	400,932,967	29,536,000	430,469,000	107,617,250	107,617,250	107,617,250	107,617,250	105,099,750
81	Fena Fafan	Batu Karang	-	400,932,967	25,826,000	426,759,000	106,689,750	106,689,750	106,689,750	106,689,750	104,194,000
Jumlah VI			-	4,410,262,633	438,557,000	4,848,820,000	1,212,205,000	1,212,205,000	1,212,205,000	1,212,205,000	1,183,848,250
JUMLAH TOTAL (I + II + III + IV + V + VI)			428,400,000	32,475,570,300	3,608,396,700	36,512,367,000	9,128,091,750	9,128,091,750	9,128,091,750	9,128,091,750	8,917,075,250



DPMOP3A



BUPATI BURU SELATAN,

LA HAMIDI